

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta.

Abdul Kadir Karding 2008. Tesis: "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang. Semarang: Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
Semarang http://ata.ataueprints.undip.ac.id/ata/16087/ata/1/ata/ABDUL_KADIR_KARDING.pdf di akses 27 Mai 2018

Burhan Bungin, 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana,

Nugroho, Dr. Riant. 2014. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho. 2018. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Prayitno, Dwi. 2008. SPSS untuk analisis data dari uji statistik. Yogyakarta. Mediakom

Putera, Roniekha, 2015, Junal "Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan dalam Pencapaian "Millennium Development Goals". Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Andalas Padang.

<https://atauatauejournal.unisba.ac.id/atauindex.php/atauimbaratauarticle/atauview/atau1322>

Smith, Thomas B. 1973, *The Policy Implementation Process*, Policy Sciences 4, pp. 197 – 209., Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam – Printed in Scotland.

Sumaryadi, I nyoman, 2005, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* 2005, Jakarta: Citra Utama.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*, Yogyakarta : Media Pressindo.

Fikri Habibi, 2017. *Transisi Peralihan Kewenangan Bidang Pendidikan SmaatauSmk Di Provinsi Banten. Program Studi Administrasi Negara, Universitas Serang Raya.. Vol 5 No 2, Oktober 2017, 11-22*

Myra Amanda Islamey, 2016. *Proses Peralihan Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Menengah Dari Kabupaten Bintan Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus Persiapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau)*. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Dennis Abel Timotius Panjaitan, Budi Gutami, Suhartoyo, 2017. *Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Bidang Pendidikan Menengah Dari Pemerintah KabupatenatauKota Kepada Pemerintah Provinsi Sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang*

Pemerintahan Daerah. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Volume 6, Nomor 2.

Nunik Retno Herawati, 2017. *Nalisis Politik Alih Kewenangan Pengelolaan Guru SmaatauSmk Dari Pemerintah Kabupaten atau Kota Kepada Pemerintah Provinsi*. Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Vol. 16 |No. 2 |Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang otonomi daerah

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Haluan Harian.com. 2016. Ahli Kewenangan SMA atau SMK dan Kualitas Pendidikan. [https: www.harianhaluan.com](https://www.harianhaluan.com) atau mobile atau detail berita atau50078 atau ahli-kewenangan-sma-smk-dan-kualitas-pendidikan. Diakses pada Senin

Haluan Harian com. Kewenangan SMA beralih ke Provinsi [https: atau atau harian haluan.com](https://www.harianhaluan.com) atau new satu detail atau 63277 atau kewenangan-sma-beralih-ke-provinsi.Diakses pada Senin

Harian haluan com, Gaji guru honorer pemprov sumbar [https: atau atau www.harian haluan.com](https://www.harianhaluan.com) atau new satau detail atau 72236 atau gaji-guru-honor-er-pemprov-sumbar-%E2%80%9Cseupil%E2%80%9D diakses senin